

Judul : Sistem ekonomi mesti saling sinergi, demi sejahteraan rakyat
Tanggal : Jumat, 26 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Demi Sejahteraan Rakyat Sistem Ekonomi Mesti Saling Sinergi



Ahmad Labib

ANGGOTA Komisi VI DPR Ahmad Labib mendesak ada sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menjelaskan, sistem keuangan negara mencakup empat instrumen utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan, serta transfer ke daerah. Keempat instrumen itu harus dikelola secara sinergis agar tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan.

"Alhamdulillah dengan Menteri Keuangan yang baru, transfer ke daerah (TKD) dikembalikan lagi. Hal ini diharapkan dapat menjadi daya dorong pembangunan di daerah yang sempat lesu kemarin," ujar Labib dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Labib bilang, belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendo-

rong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengendalikan defisit dan utang agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Anggaran juga perlu difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya dukungan fiskal bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Dukungan itu dapat berupa keringanan pajak, subsidi bunga investasi, hingga akselerasi digitalisasi.

Menurut Labib, ekonomi digital akan menjadi motor utama generasi muda, terutama Gen Z, dengan kontribusi yang diproyeksikan mencapai 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030. Diketahui, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat hingga 360 miliar dolar AS pada 2030, dan berpotensi memberi kontribusi signifikan pada PDB.

Dia lalu menyoroti penerimaan pajak yang harus dioptimalkan lewat penegakan hukum, terutama terhadap penunggak pajak besar, bukan dengan menambah beban masyarakat. Ada lebih dari 200 penunggak pajak dengan nilai di atas Rp60 triliun. "Kalau ini dioptimalkan, penerimaan akan jauh lebih baik daripada membebani masyarakat," tegasnya.

Ia juga mendorong strategi ke depan mencakup perluasan sumber pendapatan negara, optimalisasi BUMN, efisiensi belanja, serta transparansi APBN melalui digitalisasi agar partisipasi publik dalam pengawasan semakin meningkat.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kalau hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan, ketimpangan akan tetap terjadi," imbuhnya. ■ TIF